

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan suatu tindakan atau kegiatan dalam akuntansi. Dalam proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akuntabilitas termasuk salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh setiap sekolah. Akuntabilitas dapat memberikan dampak yang positif bagi sekolah sebagai salah satu upaya dalam mendapatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas dalam bahasa Inggris adalah *accountability* yang artinya adalah pertanggungjawaban atau suatu keadaan yang harus dipertanggungjawabkan atau diminta pertanggungjawaban. (Nupus, 2021:19).

Secara umum akuntabilitas adalah suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberikan jawaban kepada publik atau pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud diantaranya pimpinan lembaga, pemerintah dan masyarakat umum. Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan yang telah dilakukan terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Rasul, 2002:8)

Menurut Budiarjo dalam Sutedi (2009:397) menjelaskan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat tersebut. Minarti (2011:225) mengatakan

akuntabilitas adalah suatu kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Wiratna (2015:28) akuntabilitas merupakan suatu keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dipegang sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabel dalam hal ini berarti pertanggungjawaban dengan kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada pihak sekolah.

Menurut Mardiasmo (2018:21) akuntabilitas adalah:
“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018:6) definisi akuntabilitas secara singkat merupakan kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan. Definisi ini memberikan pengertian secara tidak langsung terhadap hubungan antara aktor (yang dinilai), penilai dan forum, pejabat atau yang dinilai.

Berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2021 pasal 2, pengelolaan Dana BOS akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Nopus (2021:19) terdapat empat pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, diantaranya yaitu:

1. Adanya transparansi, dari para penyelenggara sekolah dengan terbuka menerima masukan dan mengikutsertakan partisipasi orang tua atau pemangku kepentingan lain seperti masyarakat sebagai komponen dalam mengelola sekolah.
2. Adanya standar kerja, standar disetiap institusi yang diukur dalam melaksanakan fungsi, tugas atau wewenang dari setiap penyelenggara sekolah.
3. Adanya partisipasi, partisipasi ini guna untuk menciptakan suasana kondusif bagi kedua belah pihak baik sekolah maupun partisipasi tersebut dalam menciptakan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan.
4. Dalam pendanaan sekolah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah bersumber dari dana APBN/APBD, adapun dana dari pihak luar terutama orang tua siswa berupa sumbangan pendidikan. Sehingga sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan atau melaksanakan akuntabilitas terhadap dana tersebut yang sudah di amanahkan oleh pihak luar tersebut.

Akuntabilitas menurut Mahmudi (2016:19) dapat dikategorikan menjadi lima (5) dimensi, diantaranya: (1) akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*), merupakan akuntabilitas untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku; (2) akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*), merupakan pertanggungjawaban lembaga publik melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien; (3) akuntabilitas program (*program accountability*), merupakan akuntabilitas program yang dilakukan

merupakan program yang bermutu; (4) akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), merupakan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan harus dengan pertimbangan segala aspek; dan (5) akuntabilitas financial (*financial accountability*), merupakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien dan tidak ada pemborosan, kebocoran serta korupsi.

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban, kemampuan dan proses pertanggungjawaban atas kinerja, tindakan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkaitan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal yang memiliki hak untuk meminta dan menerima pertanggungjawaban tersebut di dalam suatu instansi atau organisasi.

2.1.1.2 Tujuan Akuntabilitas

Salah satu tujuan dari akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik sehingga sekolah yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi dan baik, akan mendorong partisipasi yang tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Mekanisme dari akuntabilitas bergantung pada kondisi dan sistem instansi, adapun diantaranya meliputi siapa yang harus melakukan akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas dilakukan, untuk apa dilakukan akuntabilitas dan bagaimana akuntabilitas dilaksanakan (Rakhmawati, 2018:103).

Selain itu, akuntabilitas juga bertujuan guna terciptanya penyelenggaraan layanan sekolah yang baik dan sesuai, akuntabilitas bertujuan untuk mendorong terciptanya tanggung jawab guna meningkatkan kinerja sekolah sebagai salah satu

syarat terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Sehingga setiap penyelenggara sekolah memahami kewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerja sekolah kepada publik (Slamet, 2005:47).

2.1.1.3 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2018:28) menyebutkan dimensi akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) adalah kondisi terbebas dari korupsi, kolusi dan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) yaitu terdapatnya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain mengenai penggunaan sumber dana publik yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran yang ditetapkan.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*) yaitu merupakan kepatuhan terhadap prosedur dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*) yaitu menilai kesesuaian pencapaian tujuan dengan visi dan misi organisasi dan menilai keoptimalan alternatif program yang dilakukan apakah memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dilakukan atau ditetapkan

dan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa yang akan mendatang.

2.1.1.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Menurut Slamet, PH (2005:47) terdapat delapan hal atau upaya yang harus dilakukan oleh sekolah guna untuk peningkatan akuntabilitas, yaitu antara lain:

1. Menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas di sekolah termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
2. Menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi uang jelas dan tegas terhadap pelaku penyelewengan.
3. Menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan laporan kepada publik diawal setiap tahun anggaran terkait kegiatan yang telah dilakukan.
4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholder* atau pihak berkepentingan lainnya.
5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan di sekolah dan menyampaikan hasilnya kepada publik diakhir tahun sehingga publik bisa menilai.
6. Memberikan tanggapan dan solusi terhadap pertanyaan dan pengaduan publik terhadap sekolah.
7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik terlebih yang akan memperoleh pelayanan pendidikan seperti calon siswa baru atau orang tua siswa baru.

8. Mengupdate atau memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen yang baru.

Upaya-upaya diatas kembali pada kemampuan dan kemauan sekolah dalam mewujudkannya. Sekolah dapat melibatkan *stakeholder* seperti orang tua siswa, kelompok profesi untuk menyusun dan memperbarui sistem. Sehingga dengan dilibatkannya *stakeholder* seperti orang tua siswa, kelompok profesi sejak awal mengetahui dan memiliki akan sistem sekolah yang ada.

2.1.1.5 Indikator Akuntabilitas

Menurut Nupus (2021:23) untuk mengukur keberhasilan akuntabilitas dalam manajemen sekolah, terdapat beberapa indikator untuk menilai keberhasilan dari akuntabilitas tersebut, antara lain:

1. Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap sekolah.
2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak dan kewajiban menilai kinerja sekolah.
3. Meningkatnya kesesuaian program atau kegiatan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.
4. Berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di sekolah.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Definisi Transparansi

Selain akuntabilitas, aspek penting lain yang harus diterapkan dalam pengelolaan suatu tindakan atau kegiatan dalam akuntansi adalah transparansi. Transparansi memiliki arti keterbukaan yang berkaitan dengan semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau suatu lembaga lain seperti dalam

memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang berkepentingan atau membutuhkan informasi. Keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam memberikan informasi kepada publik dan memudahkan akses kepada masyarakat diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya kepercayaan publik serta meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

Mahmudi (2016:17) menyebutkan transparansi adalah suatu pemberian informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan dengan secara terbuka.

Menurut Mardiasmo, (2018:18) menjelaskan bahwa:

“Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Jubaedah, (2008:57) mengemukakan transparansi adalah:

“Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”.

Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Edowai et. al., 2021:29).

Dalam pengelolaan dana BOS transparansi merupakan aspek yang sangat penting. Jika laporan pertanggungjawaban terkait pembiayaan kegiatan pendidikan dan program kerja yang menggunakan dana BOS disusun secara baku,

disampaikan kepada publik, serta terbuka terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan, maka pembiayaan yang menggunakan dana BOS dan pertanggungjawabannya dapat dipercaya (Sutrisno, 2009:120).

Transparansi keuangan sekolah yaitu keterbukaan yang dilakukan pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan dalam manajemen keuangan sekolah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah bermakna para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama yaitu salah satunya pemenuhan kebutuhan peserta didik, dimana setiap orang yang terkait dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Jumianti, 2018:8).

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan secara menyeluruh dalam menyajikan, menyampaikan dan melaporkan suatu informasi dan/atau laporan keuangan dalam suatu tindakan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertumpu pada kebebasan mengakses aktivitas, kebijakan sekolah. Sehingga transparansi membuat publik dapat mengakses informasi yang diinginkan terkait kinerja sekolah atau instansi lain yang menggunakan dana negara dalam pengelolaan keuangannya.

2.1.2.2 Tujuan Transparansi

Menurut Jumianti (2018:9) mengemukakan tujuan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan dengan adanya kesadaran kontrol sosial dari masyarakat, dan untuk menambah wawasan juga meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu tujuan dari transparansi adalah untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara pihak sekolah dan masyarakat bahwa sekolah merupakan pelayanan pendidikan yang bersih dan profesional melalui media informasi yang disampaikan dan diberikan sekolah yang mudah di akses.

Selain mendapatkan kepercayaan publik, tujuan transparansi lainnya adalah sebagai salah satu upaya mencegah korupsi, memudahkan dalam pengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas dan untuk menguatkan hubungan sosial antara sekolah dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008, menyebutkan tujuan transparansi antara lain: (1) menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses serta alasan pengambilan keputusan publik, (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, (4) mewujudkan penyelenggaraan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dan (5) mengetahui alasan pengambilan kebijakan publik.

2.1.2.3 Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, menyebutkan prinsip-prinsip transparansi diantaranya:

1. Terdapat komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi baik dari pimpinan hingga seluruh staff.
2. Harus merupakan suatu sistem yang menjamin kegunaan sumber daya yang konsisten dan terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan sasaran.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang akan dicapai.
5. Jujur, objektif dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dan bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan menyusun laporan secara akuntabel.

2.1.2.4 Indikator Transparansi

Menurut Nopus (2021:17) mengutip dari IDASA, untuk mengukur keberhasilan transparansi dalam manajemen sekolah, terdapat beberapa indikator untuk menilai keberhasilan dari transparansi tersebut, antara lain:

1. Terdapat kerangka kerja hukum bagi transparansi pengelolaan anggaran atau dana.
 - a. Adanya pembagian kerja atau tanggungjawab yang jelas.

- b. Adanya kerangka kerja hukum yang menjabarkan peran dan tanggungjawab setiap aspek manajemen sekolah yang diukur dengan peraturan yang berlaku.
2. Terdapat akses masyarakat terhadap transparansi anggaran atau dana yang dikelola sekolah.
 - a. Adanya publikasi secara rutin setiap akhir periode pelaporan.
 - b. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran.
3. Dilakukannya audit yang efektif dan independen.
 - a. Terdapat lembaga audit yang mengaudit dan sekolah tidak menghalangi atau menutupi proses audit tersebut.
 - b. Terdapat sistem peringatan dini terkait *redflags* terjadinya penyelewengan atau pelanggaran dalam pengelolaan anggaran.
4. Terdapat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan atau pengambilan keputusan anggaran.
 - a. Terdapat keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses penganggaran.
 - b. Terdapat keterbukaan informasi kepada publik selama penyusunan anggaran.

Selain itu, Nopus (2021:18) menyebutkan indikator keberhasilan transparansi antara lain: (1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen; (2) kejelasan dan kelengkapan informasi; (3) keterbukaan; (4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

2.1.2.5 Dimensi Transparansi

Menurut Sutaryo (2011:12) dimensi dari transparansi adalah informatif dan pengungkapan. Makna dari informatif tersebut antara lain:

1. Jelas yaitu informasi yang disampaikan mudah dipahami,
2. Tepat waktu agar bisa digunakan untuk acuan dasar pengambilan keputusan,
3. Memadai yaitu dalam penyajian laporan keuangan memuat pengungkapan informasi yang memadai atas pengungkapan material,
4. Akurat tidak terdapat kesalahan-kesalahan,
5. Mudah diakses bagi pihak yang memerlukan,
6. Dapat diperbandingkan sehingga daya banding tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat kinerja antar instansi.

Adapun dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2018:19) antara lain:

1. Informatif (*Informatives*) yaitu pemberian arus informasi, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, yang disampaikan kepada *stakeholder* membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. Indikatornya antara lain:
 - a. Jelas, informasi yang disediakan harus jelas sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - b. Tepat waktu, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - c. Memadai, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan memuat pengungkapan yang memadai mengenai hal-hal material.

- d. Dapat diperbandingkan, sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 - e. Mudah di akses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
2. Keterbukaan (*Openness*) yaitu keterbukaan informasi memberi hak kepada publik dan setiap orang untuk memperoleh informasi secara terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Pengungkapan (*Disclosure*) yaitu pengungkapan kepada publik atas aktifitas dan kinerja finansial.
- a. Kondisi keuangan, suatu tampilan atau keadaan kondisi keuangan secara utuh selama satu periode atau waktu tertentu.
 - b. Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.3 Partisipasi Orang Tua

2.1.3.1 Definisi Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Partisipasi didefinisikan sebagai suatu hak dan kewajiban seseorang dalam memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Menurut Baedhowi dan Surya Dharma (2010:40) partisipasi merupakan keterlibatan aktif *stakeholder* dalam hal ini adalah orang tua dengan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (Sekolah) baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengevaluasi dan pengawasan sekolah.

Menurut Mulyadi (2010:513) mengemukakan:

“Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputusan tersebut. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating managers* dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan datang yang akan ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran”.

Menurut LAN dan BPKP (2000) partisipasi adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui suatu intermediasi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Menurut W. Lien dalam Rosyada (2007:20) menjelaskan sekolah yang demokratis akan melibatkan masyarakat dalam sekolah karena sistem pendidikan merupakan refleksi dari keinginan masyarakat terutama orang tua. Jika partisipasi orang tua dalam sekolah sudah dilakukan dengan baik maka keikutsertaan peran masyarakat dalam penentuan kebijakan akan baik.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjelaskan bahwa perlu adanya peran serta dan dukungan masyarakat yang lebih optimal dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan.

Dari uraian definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu hak dan kewajiban keterlibatan aktif atau keikutsertaan *stakeholder* dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, partisipasi orang tua

dalam pengelolaan dana BOS merupakan hak dan kewajiban setiap orang tua untuk terlibat aktif dan ikut serta dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2.1.3.2 Indikator Partisipasi

Indikator partisipasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dimana komite sekolah berperan sebagai antara lain:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik berupa materi atau finansial, pemikiran/ide/gagasan maupun tenaga.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintahan (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

2.1.4 Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.1.4.1 Teori Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan, ketepatan sasaran dan tercapainya tujuan dari suatu instansi atau organisasi. Menurut Mardiasmo (2018:4) efektivitas merupakan suatu keadaan tingkatan tercapainya tujuan pada hasil program yang telah ditetapkan atau diharapkan melalui penyelesaian

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sebuah program dinyatakan efektif apabila bisa dicapainya tujuan serta sasaran akhir kebijakan.

Menurut Bastian (2015:310) efektivitas ialah interaksi dari keluaran serta tujuan, dimana efektivitas dapat dihitung dengan mengetahui seberapa besar tingkatan keluaran, peraturan serta kebijakan organisasi dalam menggapai tujuan yang sudah disetujui bersama. Efektivitas menurut Sondang (2016:24), adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana dalam jumlah tertentu secara sadar yang sudah ditetapkan untuk menghasilkan tujuan dari kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil dari suatu kegiatan semakin mendekati sasaran, maka artinya semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Menurut Pamungkas (2021:11) mengutip dari Indriana (2013), efektivitas dapat disebut sebagai besaran atau ukuran kontribusi output yang dihasilkan terhadap sebuah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*). Kaitan efektivitas dengan pendidikan yaitu ada tiga dimensi diantaranya adalah *the administrator production function* yaitu meninjau produktivitas sekolah dari segi keluaran administratif terkait kualitas layanan yang dapat diberikan dalam proses pendidikan, *the psychologist's production function* yaitu meninjau produktivitas dari segi keluaran perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh peserta didik sebagai gambaran prestasi akademik, dan *the economic's production function* yaitu meninjau produktivitas sekolah dari segi keluaran ekonomis berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan di sekolah.

Efektivitas merupakan perbandingan antara *output* atau keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu hal dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mahmudi, 2010:143). Terdapat beberapa kriteria yang menjadi ukuran tercapainya efektivitas, antara lain:

- 1) Terdapat kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
- 2) Terdapat kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan,
- 3) Terdapat proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap,
- 4) Terdapat perencanaan yang matang,
- 5) Terdapat perencanaan program yang tepat,
- 6) Tersedianya sarana dan prasana kerja,
- 7) Tercapainya pelaksanaan yang efektif dan efisien,
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian sekolah yang bersifat mendidik.

2.1.4.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang sudah dimulai sejak tahun 2005. Dana BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya dilakukan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum tujuan dana BOS adalah untuk meringankan beban biaya operasional sekolah atau pembiayaan pendidikan bagi masyarakat dalam program wajib sekolah.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 pasal 7 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan,

satuan pendidikan penerima dana BOS meliputi SD, SDLB, SMP, SMA, SMALB, SLB dan SMK. Dana BOS terdiri atas Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler merupakan dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja merupakan dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik.

Dalam Pasal 8 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, kriteria penerima dana BOS Reguler antara lain sekolah harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki NPSN yang terdata dalam Aplikasi Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data dalam Aplikasi Dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang terdata dalam Aplikasi Dapodik;
- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama satuan pendidikan;
- e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerjasama; dan
- f. tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

2.1.4.3 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 38 ayat (1) menjelaskan dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana

BOS. Adapun komponen penggunaan dana BOS Reguler disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) diantaranya:

- a. penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- l. pembayaran honor.

2.1.4.4 Larangan Penggunaan Dana Operasional Sekolah

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 48 ayat (2) bagian kelima tentang tata cara penggunaan dana BOS menyebutkan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik (BOSP) tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja atau kegiatan yang sudah dibayai secara penuh oleh sumber lain yang sah.

2.1.4.5 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Tercantum dalam pasal 2 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, Dalam pengelolaan dana BOSP harus dilakukan berdasarkan prinsip fleksibel,

efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Terdapat tiga tahapan pokok pengelolaan dana BOSP antara lain yaitu: (1) Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP, (2) Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOSP, dan (3) Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana BOSP.

Pada tahapan perencanaan dan penganggaran yaitu dilakukan sebelum satuan pendidikan menggunakan dana BOSP dan disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS. Dalam tahapan ini dilakukan kegiatan penyusunan dokumen RKAS yang dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah. Pada tahapan pelaksanaan penatausahaan dana BOSP, penggunaan dana harus sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah diinput pada ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Setiap penggunaan dana BOSP dicatat secara lengkap dengan disertai bukti-bukti pendukung termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku. Setiap penggunaan dana harus diinput dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidik. Lalu pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP, laporan disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP. Tahapan ini termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan. Bentuk dokumen laporan tercantum dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidik yang sudah diverifikasi, divalidasi dan disampaikan oleh satuan pendidik. Pada tahap ini satuan pendidik harus bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun indikator keberhasilan efektivitas program adalah sebagai berikut:

1) Ketepatan Sasaran Program

Yaitu melihat sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan.

2) Sosialisasi Program

Yaitu kemampuan dari penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada publik.

3) Tujuan Program

Yaitu dilihat sejauh mana keselarasan antar hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

4) Pemantauan Program

Yaitu dilakukan setelah terlaksananya program sebagai bentuk pengevaluasian.

2.2 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Silvy Nur Rachmi (2017) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cianjur.
2. Ita Rakhmawati (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Stakeholder sebagai Variabel Moderasi pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus.

3. Cindy Claudia Frederik, Octavianus MT Muaja, Ignatia Honandar (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD, SMP dan SMA di Kota Manado.
4. Artika Ika (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD di Kecamatan Bulukerto.
5. Rini Alyu Hamida (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muara.
6. Tri Rizki Apriliani (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
7. Fauzan Haqiqi, Bayu Afriandi Rosa Nugraha (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS di SDN 11 Sendanu Darulihsan.
8. Alya Elita Sijoen, Stefen Ratu Ludji (2020) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang.

9. Shilvia Hayatun Nupus (2021) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.
10. Eka Puteri Tristie Sine, Maria E.D. Tunti, Sarinah Joyce Margaret Rafael (2021) telah melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah di Kota Kupang.
11. Andiet Yoga Pamungkas (2021) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri di Kota Samarinda.
12. Mimi Sintia Nodera, Ratih Kusumastuti, Salman Jumaili (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Merangin Tahun 2021.
13. Suhesti Ningsih, Selvi Puspitasari, Abdul Haris Romdhoni (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Sekolah dan Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Siswa.
14. Dani Rachman, Djodi Setiawan, Reza Maftuh Taufik Nugraha (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA.

15. Adinda Amalia Putri Tanjung, Nelly Masnila, M. Husni Mubarak (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih.
16. Monik Yosefa Ega Wele, Titik Mildawati (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana BOS.
17. Nurul Widiana Amin, Eni Indriani, Yusli Mariadi (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021.
18. Alista Kusuma Ramadhani (2023) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD pada tingkat Kecamatan Pleret, Bantul Yogyakarta.
19. Silfina Anisya (2023) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Masa Pandemi *COVID-19* di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang
20. Teti Tri Astuti Jusasni, Saparuddin Siregar, Muhammad Latief Ilhamy Nasution (2023) telah melakukan penelitian yang berjudul *The Effect of Accountability and Transparency of Financial Accountability Reporting on*

The Budget Management of School Operational Assistance Funds (BOS) At Sds Alwashliyah 5 Belawan Medan City.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, penulis mengajukan pembahasan yang akan diteliti mengenai Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selanjutnya disusun dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu”**. Adapun untuk dapat melihat orisinalitas penelitian, disajikan pada tabel 2.1 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Silvy Nur Rachmi, 2017, Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cianjur.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Akuntabilitas dan Transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cianjur.	<i>Repository Universitas Widyatama, 2017, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama.</i>
2	Ita Rakhmawati, 2018, SMA Negeri di Kabupaten Kudus.	Variabel Dependen: Akuntabilitas, Transparansi, Variabel	Variabel Moderasi: Stakeholder, Variabel Independen:	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, sedangkan	Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 1 No. 1 Hal. 95-112 (2018), ISSN: 2622-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis: Regresi Moderasi dengan Uji Interaksi	Transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Partisipasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara Akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan dana BOS. Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi hubungan Transparansi pada efektivitas pengelolaan dana BOS.	2345 e-ISSN: 2622-5255, Prodi Akuntansi Syariah IAIN Kudus.
3	Cindy Claudia Frederik, Octavianus MT Muaja, Ignatia Honandar, 2019, SD, SMP dan SMA di Kota Manado.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Alat Analisis: Regresi Linear	Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Transparansi tidak berpengaruh signifikan namun memiliki arah positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS), dan Partisipasi berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	<i>Repository</i> Universitas Katolik De La Salle Manado, 2019, Mr Victor Edwin Ohoiwutun.
4	Artika Ika, 2019, SD di Kecamatan Bulukerto.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan dana Bantuan	Variabel Independen: Partisipasi Masyarakat. Alat Analisis: Uji Kualitas Data	Akuntabilitas berpengaruh positif dalam memprediksi efektivitas pengelolaan dana BOS. Transparansi berpengaruh positif dalam memprediksi efektivitas pengelolaan dana	<i>Repository</i> Muhammadiyah <i>University of</i> Ponorogo, 2019, Editor FE.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Operasional Sekolah (BOS).		BOS. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dalam memprediksi efektivitas pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua berpengaruh positif dalam memprediksi efektivitas pengelolaan dana BOS.	
5	Rini Alyu Hamida, 2019, SMP di Kabupaten Muara Enim.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi.	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS).	Transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan dana BOS. Partisipasi <i>stakeholder</i> berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan dana BOS. Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas laporan keuangan dana BOS	<i>Repository</i> Universitas Jenderal Soedirman, 2021, Mr Bayu Ananda.
6	Tri Rizki Apriliani, 2019, Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bandung.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Secara Parsial dan Simultan menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung.	<i>Repository</i> Universitas Widyatama, 2019, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi – Bisnis Universitas Widyatama.
7	Fauzan Haqiqi, Bayu Afriandi Rosa Nugraha, 2019, SDN 11 Sendanu Darulihсан.	Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas.	Variabel Independen: Kinerja Pengelolaan Dana BOS, Partisipasi Orang Tua, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.	Secara parsial variabel Transparansi (x1) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja Pengelolaan Dana BOS (Y) pada SDN 11 Sendanu Darulihсан dan variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan	Jurnal Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi dan Manajemen Hal. 235-245, Vol. 3 No. 3 (2019), e-ISSN: 2598-81107 p-ISSN: 2620-9500.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	terhadap variabel Kinerja Pengelolaan Dana BOS (Y) pada SDN 11 Sendanu Darulhsan. Secara simultan variabel Transparansi (X1) dan variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja Pengelolaan Dana BOS (Y) pada SDN 11 Sendanu Darulhsan.	
8	Alya Elita Sijoen, Stefen Ratu Ludji, 2020, SD Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang.	Variabel Independen: Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis: Analisis Deskripsi Kuantitatif, Analisis <i>value for money</i> .	Pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 kota Kupang kurang efektif karena belum sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan karena pengelolaan dana BOS yang seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan juga pada alokasi biaya penggunaan dana BOS terdapat biaya lain-lain yang tidak dapat dijelaskan dalam hal ini penyampaian laporan pertanggung jawaban sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu.	Jurnal Inspirasi Ekonomi Vo. 2 No. 3 (2020), e- ISSN: 2503- 3123, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor.
9	Shilvia Hayatun Nupus, 2021, Seluruh SMP/MTsN di Kabupaten Aceh Tenggara.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan dana Bantuan	Variabel Independen: Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah, Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis:	Secara parsial Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, sedangkan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah tidak	<i>Repository</i> UIN Sumatera Utara, 2022, Mrs Siti Masitah.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Operasional Sekolah (BOS).	Uji Kualitas Data	berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Secara simultan Transparansi, Akuntabilitas dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	
10	Eka Puteri Tristie Sine, Maria E.D. Tunti, Sarinah Joyce Margaret Rafael, 2021, Sekolah di Kota Kupang.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Alat Analisis: Analisis Deskriptif Kualitatif.	Penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan juknis BOS yang dilakukan oleh sekolah kepada pihak-pihak terkait sedangkan Transparansi dalam pengelolaan dana BOS belum berjalan dengan baik karena masih adanya kekurangan pada tahap publikasi.	Jurnal Akuntansi Vol. 9 No. 1 Hal. 1-8, 2021, e-ISSN: 2715-1158 p-ISSN: 2338-4468, UNDANA (Universitas Nusa Cendana).
11	Andiet Yoga Pamungkas, 2021, SMA Negeri di Kota Samarinda.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Alat Analisis: Statistik Deskriptif	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), namun partisipasi orang tua tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	<i>Repository Universitas Islam Indonesia</i> , 2021.
12	Mimi Sintia Nodera, Ratih Kusumastuti, Salman Jumaili, 2022, SMAN 7 Merangin.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi.	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua,	Transparansi dan Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan	Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi Vol. 7 No. 1 Hal. 799-809 (2023),

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan dana BOS. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
13	Suhesti Ningsih, Selvi Puspitasari, Abdul Haris Romdhoni, 2022, SD Negeri 1 Bendan, Bayudono Regency.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi,.	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua. Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Metode Kuantitatif Eksplanatori.	Hasil uji t membuktikan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap partisipasi orang tua, sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap partisipasi orang tua. Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap partisipasi orang tua sebesar 73,80% sedangkan 26,20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.	Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 23 No. 1 (2022), ISSN: 1412- 629X e-ISSN: 2579-3055.
14	Nugraha, 2022, SMA Islam Terpadu SASAMA Kabupaten Bandung.	Variabel Independen: Transparansi, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Koefisien Korelasi.	Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA SASAMA.	Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 13, No. 03 (2022), P-ISSN: 2086-4159, E- ISSN: 2656- 6648, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung.
15	Adinda Amalia Putri Tanjung, Nelly Masnila, M. Husni Mubarok, 2022, SD dan SMP di Kota Prabumulih.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua,	Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana	Jurnal Syntax Admiration, Vol. 3 No. 8 (2022), p-ISSN: 2722-7782 e- ISSN: 2722- 5356, Ridwan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).		bantuan operasional sekolah (BOS). Dan secara bersamaan ada pengaruhnya secara positif dan signifikan antara Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua kepada efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).	Institute
16	Monika Yosefa Ega Wele, Titik Mildawati, 2022, SMP Negeri Satu Atap Wae Ratun.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Variabel Dependen: Pengelolaan Anggaran Dana BOS.	Variabel Independen: Pelaporan Pertanggung jawaban, Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, artinya dengan adanya akuntabilitas sekolah dapat dikatakan bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOS. Sehingga sekolah dapat meningkatkan pelaporan pertanggungjawaban kualitas dalam keuangan, serta memperoleh kepercayaan dari orangtua peserta didik, masyarakat, dan juga pemerintah. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, artinya pelaksanaan pengelolaan dana BOS tidak bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta tidak mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 11 No. 5 (2020), e-ISSN: 2460-0585.
17	Nurul Widiani Amin, Eni Indriani, Yusli Mariadi, 2022, SDN	Variabel Independen: Akuntabilitas,	Variabel Independen: Partisipasi	Pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip Akuntabilitas	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7 Mataram, SDN 12 Mataram, SDN 36 Mataram.	Transparansi.	Orang Tua, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Alat Analisis: Analisis Deskriptif.	dan Transparansi sudah cukup baik. Adapun faktor pendukung penerapan Akuntabilitas dan Transparansi yaitu; (1) keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan dana BOS, (2) kejelasan aturan dalam pengelolaan dana BOS.	2 No.1 (2022), P-ISSN: 2798-0278, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
18	Alista Kusuma Ramadhani, 2023, SD pada tingkat Kecamatan Pleret, Bantul Yogyakarta.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Variabel Independen: Komitmen Organisasi, Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis: Statistik Deskriptif	Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	<i>Repository</i> Universitas Islam Indonesia, 2023.
19	Silfina Anisya, 2023, Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi.	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua. Variabel Dependen: Kinerja Pengelolaan Dana BOS, Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Alat Analisis: Uji Kualitas Data.	Secara parsial Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana BOS. Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana BOS.	<i>Repository</i> STIE PGRI Dewantara Jombang, 2023, Tri Wilujeng Mardiana.
20	Teti Tri Astuti Jusasni, Saparuddin Siregar, Muhammad Latief Ilhamy Nasution, 2023, Sds Al Washliyah 5 Belawan Kota Medan.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi.	Variabel Independen: Partisipasi Orang Tua. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, artinya dengan akuntabilitas sekolah dapat dikatakan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS. Transparansi	<i>Jurnal of Management, Economic and Accounting</i> Vol.2 No. 2 Hal. 189-200 (2023), e-ISSN: 2962-4134, Universitas Dehasen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana BOS. Artinya apabila pengelolaan dana BOS dikelola dengan mengedepankan prinsip transparansi maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS.	Bengkulu.

Sumber: diolah oleh peneliti.

2.3 Kerangka Pemikiran

Efektivitas merupakan perbandingan antara *output* atau keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu hal dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mahmudi, 2010:143). Terdapat beberapa kriteria yang menjadi ukuran tercapainya efektivitas, antara lain: (1) Terdapat kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Terdapat kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan; (3) Terdapat proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap; (4) Terdapat perencanaan yang matang; (5) Terdapat perencanaan program yang tepat; (6) Tersedianya sarana dan prasana kerja; (7) Tercapainya pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan (8) Sistem pengawasan dan pengendalian sekolah yang bersifat mendidik.

Sesuai dengan Permendikbud No 6 Tahun 2021 pasal 2, pengelolaan Dana BOS harus dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2018:21) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi lima (5) dimensi sebagai indikatornya menurut Mahmudi (2016:19), diantaranya: (1) akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*); (2) akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*); (3) akuntabilitas program (*program accountability*); (4) akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*); dan (5) akuntabilitas financial (*financial accountability*), merupakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien dan tidak ada pemborosan, kebocoran serta korupsi.

Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi adalah suatu pemberian informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan dengan secara terbuka. Adapun dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2018:19) antara lain: (1) Informatif (*Invormatives*) yaitu pemberian arus informasi, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, yang disampaikan kepada *stakeholder* membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. Indikatornya antara lain jelas, tepat waktu, memadai, dapat diperbandingkan dan mudah diakses; (2) Keterbukaan (*Openness*) yaitu keterbukaan informasi memberi hak kepada publik dan setiap orang untuk memperoleh informasi secara terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Pengungkapan (*Disclosure*) yaitu pengungkapan kepada publik atas aktifitas dan kinerja

finansial. Indikatornya antara lain kondisi keuangan dan Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan.

Menurut Baedhowi dan Surya Dharma (2010:40) partisipasi merupakan keterlibatan aktif *stakeholder* dalam hal ini adalah orang tua dengan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Sekolah) baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengevaluasi dan pengawasan sekolah.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terkait indikator partisipasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana komite sekolah berperan sebagai antara lain: (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) Pendukung (*supporting agency*) baik berupa materi atau finansial, pemikiran/ide/gagasan maupun tenaga; (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan (4) Mediator antara pemerintahan (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen dalam membuat keputusan dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan tujuan organisasi yang akan dicapai. Teori keagenan dalam hal ini membahas tentang interaksi antara prinsipal (masyarakat) dan agen (sekolah). Dalam teori keagenan menyatakan bahwa agen berperilaku mementingkan diri sendiri (*self-interest*), ini berlawanan dengan kepentingan

prinsipal, sehingga prinsipal membuat struktur mekanisme pengawasan agen agar tidak berperilaku mementingkan dirinya sendiri (oportunistik) dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Teori keagenan menyatakan terdapat dua pilihan prinsipal yang dapat mengurangi masalah keagenan, hal tersebut dapat menghambat agen untuk bersifat oportunistik (Supriyono, 2018:63).

Menurut Eisenhardt, (1989) dalam Subha (2022:21) terdapat dua aspek masalah dalam *agency problem*. Yaitu antara lain: (1) *adverse selection*, merupakan masalah yang mengacu pada kondisi dimana prinsipal tidak dapat memastikan kesesuaian kemampuan yang dimiliki oleh agen dengan kemampuan yang dimilikinya; dan (2) *moral hazard*, merupakan permasalahan yang mengacu pada ketidaksesuaian tindakan dengan apa yang telah disepakati bersama dengan prinsipal. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian yang melingkupi sebagian besar organisasi.

Pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah teori keagenan telah dipraktikan dan digunakan untuk mengeksplorasi peran informasi dapat meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh *adverse selection* dan *moral hazard*. Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mardiasmo (2018:23) mengacu pada *World Bank* mengungkapkan *good governance* merupakan suatu pelaksanaan dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. menghindari kesalahan dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework*.

Sementara menurut Karianga (2017:40) *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola yang baik dalam pemerintahan dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi.

Konsep *good governance* pada awalnya didasari gagasan yang sifatnya interdependensi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta secara sehat dan seimbang. Oleh karena itu, agar proses kebijakan publik dapat direduksi dengan efektif dan berhasil, maka diperlukan interaksi antara negara, masyarakat dan pihak swasta yang harus dilandasi dengan unsur transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi orang tua memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Pernyataan mengenai adanya pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di dukung oleh penelitian Rachmi (2017) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sama dengan penelitian Rakhmawati (2018) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Dan Frederik, et. al. (2019)

menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

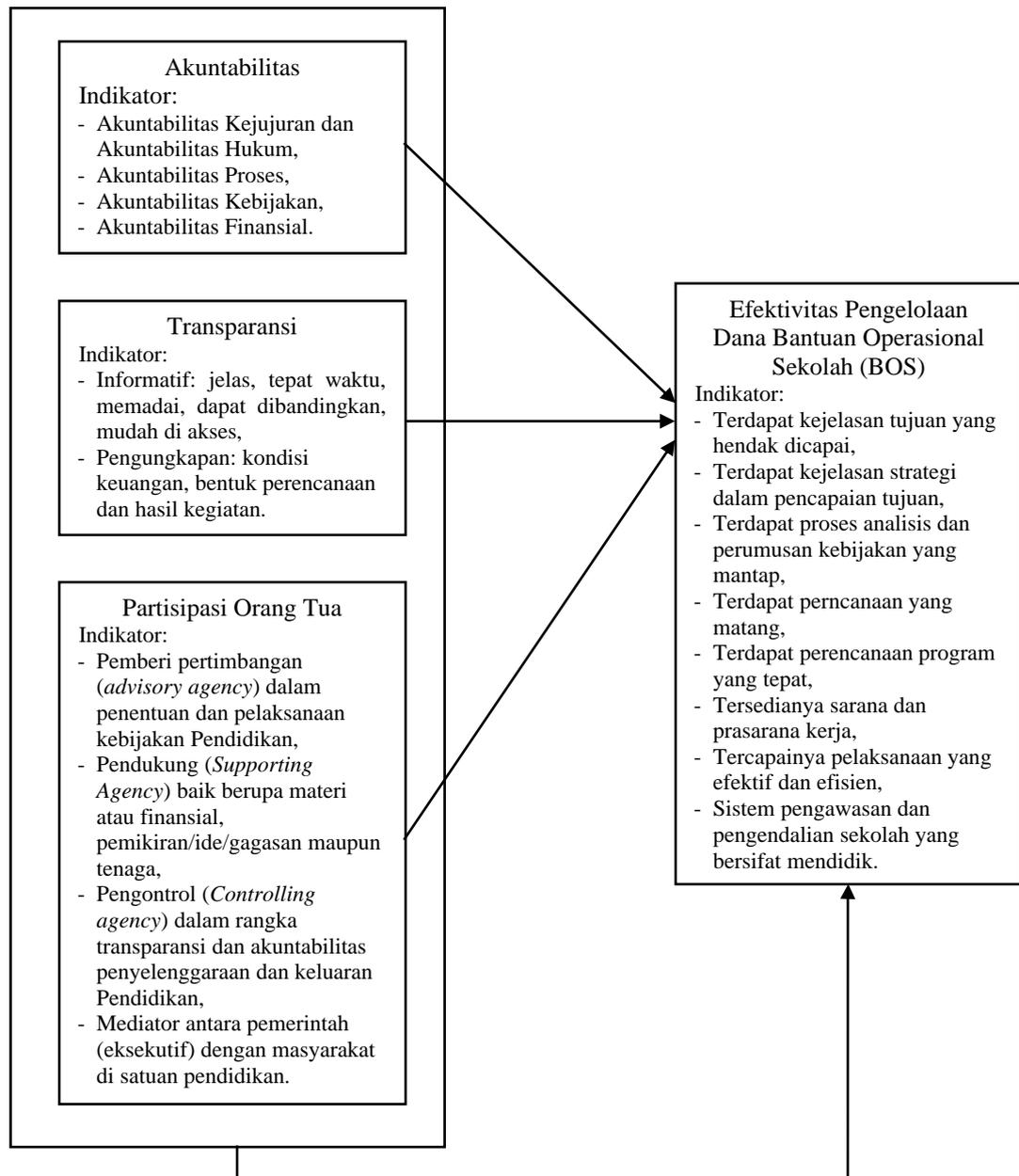
Pernyataan mengenai adanya pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di dukung oleh penelitian Ika (2019) yang menyatakan Transparansi berpengaruh positif dalam memprediksi efektivitas pengelolaan dana BOS. Dalam penelitian Apriliani (2019) juga menyatakan secara Parsial dan Simultan menunjukan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan menurut dengan Frederik, et. al. (2019) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh signifikan namun memiliki arah positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS).

Pernyataan mengenai adanya pengaruh partisipasi orang tua terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS didukung oleh Frederik, et. al. (2019) menyatakan Partisipasi berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan menurut Pamungkas (2021) menyatakan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), namun partisipasi orang tua tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Pernyataan mengenai adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi orang tua terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS didukung oleh penelitian Tanjung, et. al. (2022) menyatakan akuntabilitas, transparansi dan Partisipasi Orang Tua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dan secara bersamaan ada pengaruhnya secara positif dan signifikan antara Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua kepada efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Rachman, et. al. (2022) menyatakan Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Serta penelitian Apriliani (2019) menyatakan bahwa secara parsial dan simultan menunjukn bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, penelitian terdahulu dan model kerangka konseptual, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut:

H_1 = Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS.

H_2 = Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS.

H_3 = Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS.

H_4 = Partisipasi Orang Tua berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS.